



**PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573





Sekapur Sirih

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin serta ridho-Nya, Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Pengadilan Negeri Pekanbaru menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan sekaligus bahan evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Saya selaku Pimpinan mengucapkan terimakasih kepada Hakim dan Karyawan/ti Pengadilan Negeri Pekanbaru atas kinerja dan dedikasi dalam mengabdikan dan melaksanakan tugas peradilan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahun berikutnya.

Pekanbaru, 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



BAMBANG TRIKORO

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA

JL. TRIKORO 85 TELP. 22573 PEKANBARU



VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

NILAI NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas dan Kejujuran
3. Akuntabilitas
4. Responsibilitas
5. Keterbukaan
6. Ketidakberpihakan
7. Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum

PROFIL PIMPINAN



BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

Lahir di Padang Panjang, 30 September 1970. Dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 20 Mei 2025.

RIWAYAT JABATAN

- Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (20 Mei 2025)
- Ketua Pengadilan Negeri Batam (09 Januari 2024)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam (25 Februari 2022)
- Ketua Pengadilan Negeri Bangil (29 Oktober 2021)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga (13 November 2019)
- Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (27 Maret 2018)
- Ketua Pengadilan Negeri Solok (25 Januari 2017)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian (08 Juli 2013)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (01 Juli 2013)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cilacap (04 Juni 2010)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangil (02 Januari 2007)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Biak (19 Agustus 2002)
- Staf Pengadilan Negeri Jayapura (01 April 2000)
- Staf Pengadilan Negeri Jayapura (01 Maret 1999)

PROFIL PIMPINAN



DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

Lahir di Jember, 16 Juli 1976. Dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 01 November 2024.

RIWAYAT JABATAN

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (01 November 2024)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (17 Mei 2022)
- Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat (02 Juli 2021)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil (08 November 2019)
- Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (29 Oktober 2018)
- Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang (29 November 2016)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo (19 Agustus 2015)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Magelang (09 Desember 2013)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mungkid (05 Juli 2011)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Basung (15 Desember 2008)

HAKIM



FITRIZAL YANTO, S.H.



DEDY, S.H., M.H.



ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.



ARSUL HIDAYAT, S.H., M.H.



JHONSON FREDY ERSON SIRAIT, S.H.



RONI SUSANTA, S.H., M.H.

HAKIM



HENDAH KARMILA DEWI, S.H., M.H.



AZIZ MUSLIM, S.H.



**UDUT WIDODO KUSMIRAN
NAPITUPULU, S.H., M.H.**



SUGENG HARSOYO, S.H., M.H.



YOFISTIAN, S.H., M.H.



JONSON PARANCIS, S.H., M.H.

HAKIM



DHARMA SETIAWAN, S.H., CN.



REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.



HAKIM AD HOC TIPIKOR



**ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN
HUTAGALUNG, SE., SH., MH**



YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn.



YOSI ASTUTY, S.H.



ROSITA, S.H., M.H.



Dr. EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC PHI



ARSYAWAL, S.E., S.H



RUSTAN SINAGA, SH



ARSYAWAL, S.E., S.H



ABDUL HARIS, S.H.





ASLAM IRFAN DAULAY, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Lahir di Tanjungbalai 23 September 1972. Dilantik menjadi Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 15 September 2025.

RIWAYAT JABATAN

- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru (15 September 2025)
- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang (03 Januari 2024)
- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (28 Juni 2022)
- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Stabat (05 Oktober 2018)
- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Balai (26 Januari 2018)
- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sibolga (23 Oktober 2015)
- Panitera Muda Pengadilan Negeri Tanjung Balai (05 Februari 2015)
- Panitera Muda Pengadilan Negeri Tanjung Balai (21 Mei 2010)
- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai (17 Januari 2005)
- Staf Pengadilan Negeri Tanjung Balai (01 September 1993)
- Staf Pengadilan Negeri Tanjung Balai (01 Maret 1992)



ERRY MARDIANTO, ST., SH
Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru

Lahir di Dumai 01 Maret 1976. Dilantik menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 19 Juli 2019.

RIWAYAT JABATAN

- Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru (19 Juli 2019 s/d sekarang)
- Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahun 2017-2019)
- Kasub. Bag. Kepegawaian Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahun 2012-2017)
- Staf Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahun 2005)

PERISTIWA PENTING TAHUN 2025

JANUARI 2025



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA, DAN IKRAR BERSAMA

Pengadilan Negeri Pekanbaru dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Ikrar Bersama OLEH Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Januari 2025.

FEBRUARI 2025



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU MENGIKUTI SOSIALISASI BIMBINGAN TEKNIS ZONA INTEGRITAS (ZI) SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Pengadilan Negeri Pekanbaru mengikuti Sosialisasi Bimbingan Teknis Zona Integritas (ZI) Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau secara daring pada tanggal 25 Februari 2025.

MARET 2025



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA KOTA PEKANBARU

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menghadiri Undangan Rapat koordinasi Forkopimda Forkopimda Kota Pekanbaru dan Stakeholder lainnya dengan pembahasan tentang perkembangan situasi pengungsi rohingya di Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2025.

APRIL 2025



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H., Panitera, dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 23 April 2025.

MEI 2025



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU MELAKUKAN KUNJUNGAN KIMWASMAT KE RUTAN SIALANG BUNGKUK PEKANBARU

Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) ke Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru. Kegiatan KIMWASMAT ini dipimpin oleh Ibu Lifiana Tanjung, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru) didampingi oleh Ibu Fitri Yenti, S.H (Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru), dan Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru. pada tanggal 21 Mei 2025.

JUNI 2025



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU MENGIKUTI DIALOG INTERAKTIF PRIMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU SECARA LURING DAN DARING

Pengadilan Negeri Pekanbaru mengikuti Dialog Interaktif Prima (Pengadilan Tinggi Riau Menyapa) dengan Tema Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau secara Luring dan Daring pada tanggal 17 Juni 2025.

JULI 2025



PUBLIC CAMPAIGN BANGUN INTEGRITAS BERSAMA PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Dalam mewujudkan program Mahkamah Agung RI yaitu pembangunan Zona Integritas pada badan peradilan di bawahnya, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru menggelar kegiatan Public Campaign didepan Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Jumat tanggal 04 Juli 2025.



PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN ASESMEN AMPUH OLEH PENGADILAN TINGGI RIAU DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Pengawasan dan Pendampingan Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengawasan dan pendampingan berlangsung selama dua hari yakni tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pengadilan Negeri Pekanbaru dilaksanakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan SLB Negeri Sri Mujinab Pekanbaru tentang Kerjasama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas pada tanggal 28 Juli 2025.

AGUSTUS 2025



UPACARA HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE-80

Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan Upacara Bendera peringatan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-80 yang dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Agustus 2025.

SEPTEMBER 2025



PENILAIAN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) oleh DITJEN BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Tim Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan Penilaian sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 September 2025.

OKTOBER 2025



PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Yang Mulia Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan pembinaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2025. Kegiatan pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, serta komitmen aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan secara bersih, transparan, dan akuntabel.

NOVEMBER 2025



RAPAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada bulan November 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Bambang Trikoro, S.H., M.Hum. dan dihadiri oleh Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

DESEMBER 2025



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA DAN SURAT PERINTAH KERJA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) T.A. 2026 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DENGAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAM (PAHAM) PROVINSI RIAU

Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dan Surat Perintah Kerja Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) T.A. 2026 Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Pos Bantuan Hukum Dan Ham (PAHAM) Provinsi Riau untuk Tahun 2026 pada tanggal 17 Desember 2025.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025



Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. atas prestasinya sebagai Satuan Kerja Terbaik III sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau dalam Pelaksanaan Diversi Periode Januari sampai dengan Juli 2025.

Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H. atas prestasinya sebagai Satuan Kerja Terbaik I dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 dilingkungan Pengadilan Tinggi Riau dengan kategori A (82,15) sangat baik.

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
Profil Pimpinan	3
Peristiwa Penting Tahun 2024	15
Penghargaan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2024	21
Daftar Isi	22
Bab I Pendahuluan	24
Bab II Keadaan dan Penyelesaian perkara	27
A. Keadaan Perkara	27
B. Penyelesaian Perkara	28
C. Program Prioritas Nasional	30
1. Posbakum.....	30
2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	31
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	32
- Promosi dan Mutasi	35
- Pensiun	36
- Diklat	36
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TI.....	37
A. Pengelolaan Keuangan	37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	38
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	42
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	45
A. Pembangunan Zona Integritas	45
B. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)	46
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	47
D. Inovasi Pelayanan Publik	48
BAB VI PENGAWASAN	57
A. Internal.....	57
B. Evaluasi.....	58
BAB VII PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60



BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

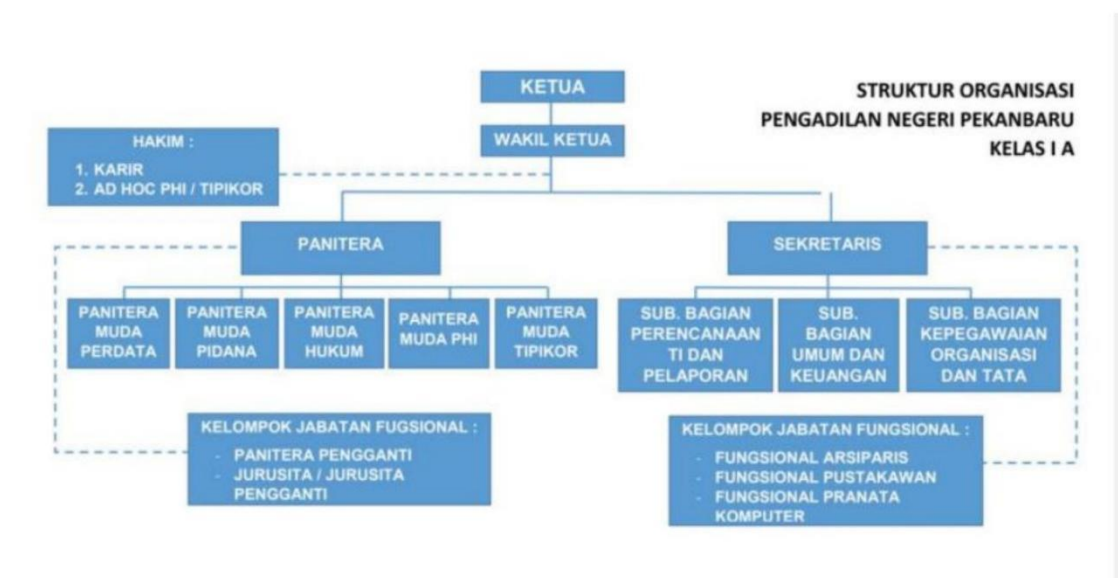
Pengadilan Negeri Pekanbaru terus meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, yaitu :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Penerapan aplikasi E-Court dengan fitur e-filing (pendaftaran perkara secara online), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara online), e-summons (pemanggilan pihak secara online dan e-Litigation (Persidangan secara online).
3. Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi WBK dari KemenPan RB.

Pengadilan Negeri Pekanbaru berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang bermutu selalu terjaga baik. Perbaikan terus menerus dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menuju arah yang lebih baik untuk mewujudkan Pengadilan unggul sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung RI.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.



BAB II

KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Jumlah perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berikut ini uraian keadaan perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025.

a. Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025.

NO	PERKARA	SISA PERKARA TH. 2024	PERKARA MASUK TH. 2025	CABUT	PERKARA PUTUS TH. 2025	SISA TH. 2025	
1	Pidana	1. Pidana Biasa	236	1.408	-	1.435	209
		2. Pidana Singkat	-	-	-	-	-
		3. Pidana Cepat	-	23	-	23	-
		4. Pidana Anak	-	23	-	21	2
		5. Pidana Pra Peradilan	-	17	-	15	2
		6. Pelanggaran Lalu Lintas	-	28.034	-	28.034	-
2	Perdata	1. Perdata Gugatan	146	470	81	304	231
		2. Perdata Permohonan	5	445	23	393	34
		3. Gugatan Sederhana	2	85	17	59	11
		4. Perlawanan/ Bantahan (Derden Verzet)	5	19	4	11	9
		5. Permohonan Konsinyasi	48	243	-	289	2
3	Pidana Khusus	Tipikor	22	75	-	71	26
4	Perdata Khusus	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	41	112	2	120	31

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus.

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara pidana dan perdata tahun 2024 yang diputus tahun 2025.

NO	PERKARA	SISA PERKARA TH. 2024	SISA PERKARA TH. 2024 YANG DIPUTUS TH. 2025	RASIO PENYELESAIAN SISA PERKARA (%)
1	Pidana	236	236	100%
2	Perdata	206	206	100%
3	Tipikor	22	22	100%
4	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	41	41	100%

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diputus tepat waktu pada Tahun 2025.

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2025	JUMLAH PERKARA PUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	RASIO PENYELESAIAN PERKARA PUTUS TEPAT WAKTU	KET
1	Pidana	1.497	1.490	7	99,5%	
2	Perdata	1181	999	182	84,58%	
3	Tipikor	74	74	0	100%	
4	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	122	122	0	100%	

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Berikut ini jumlah perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK, beserta persentasenya dibandingkan jumlah perkara yang putus.

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2025	PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2025 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2025 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI		PERKARA PN YANG PUTUS TH. 2025 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Pidana	1.497	1.409	94,12%	1.437	95,99%	1.473	98,40%
2	Perdata	1181	1089	92,20%	1.075	95,08%	1.168	98,89%
3	Tipikor	71	34	47,89%	36	50,55%	34	47,89%
4	PHI	120	-	-	58	48,33%	-	-

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Mediasi

NO	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI TH. 2025	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI			DALAM PROSES
		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	284	9	253	4	18

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil Diversi

NO	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2025	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIVERSI TAHUN 2025	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI			DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	23	4	2	2	-	-

6. Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ)

NO	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN RESTORATIVE JUSTICE TAHUN 2025	JUMLAH PERKARA RESTORATIVE JUSTICE YANG BERHASIL TAHUN 2025
1.	140	18

A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. POSBAKUM

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pos Pelayanan Hukum ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Pekanbaru bekerjasama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Siak untuk menyelenggarakan layanan Hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Anggaran yang tersedia untuk Posbakum pada DIPA Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 adalah Rp. 44.000.000,-. Anggaran tersebut terealisasi semuanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat miskin sehingga salah satu tujuan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tercapai.

Adapun isi dari MoU antara pihak LBH dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain LBH wajib membuat laporan dan jumlah masyarakat yang dilayani setiap bulannya.

Berikut anggaran dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 :

SATUAN KERJA	JUMLAH ANGGARAN POSBAKUM (Rp.)	REALISASI ANGGARAN POSBAKUM		JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM (orang)
		(Rp.)	(%)	
PN PEKANBARU KELAS I A	Rp. 44,000,000	Rp. 44,000,000	100%	168

2. PERKARA PRODEO (Pembebasan Biaya Perkara)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan.

Berikut data Prodeo pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025 :

SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA PRODEO DISELESAIKAN TH. 2025	JUMLAH ANGGARAN PRODEO (Rp.)	REALISASI ANGGARAN PRODEO	
			(Rp.)	(%)
PN PEKANBARU KELAS I A	6 perkara	Rp. 1.250.000	Rp. 867,000	69,36%

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA Tahun 2025 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang Hakim dan Pegawai dan 16 (enam belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dijelaskan pada tabel berikut ini.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.	Ketua	Jumlah Hakim 16 Orang
2	DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	FITRIZAL YANTO, S.H.	Hakim	
4	DEDY, S.H., M.H.	Hakim	
5	ARSUL HIDAYAT, S.H., M.H.	Hakim	
6	JHONSON FREDDY ESRON SIRAIT, S.H.	Hakim	
7	ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.	Hakim	
8	UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.	Hakim	
9	RONI SUSANTA, S.H., M.H.	Hakim	
10	HENDAH KARMILA DEWI, S.H., M.H.	Hakim	
11	AZIZ MUSLIM, S.H.	Hakim	
12	SUGENG HARSOYO, S.H., M.H.	Hakim	
13	JONSON PARANCIS, S.H., M.H.	Hakim	
14	YOFISTIAN, S.H., M.H.	Hakim	
15	DHARMA SETIAWAN, S.H., C.N.	Hakim	
16	REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.	Hakim	
17	ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	Jumlah Hakim Ad Hoc Tipikor 5 Orang
18	YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn.	Hakim Ad Hoc Tipikor	
19	YOSI ASTUTY, S.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	
20	ROSITA, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipiko	
21	Dr. EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	
22	ARSYAWAL, S.E., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc PHI	Jumlah Hakim Ad Hoc PHI 4 Orang
23	RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc PHI	
24	YULIAZMEN, S.H.	Hakim Ad Hoc PHI	
25	ABDUL HARIS, S.H.	Hakim Ad Hoc PHI	
26	ASLAM IRFAN DAULAY, S.H., M.H.	Panitera	
27	ERRY MARDIANTO, S.T., S.H	Sekretaris	
28	DEWI MUSTIKA INDAH, S.H., S.Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	

29	YUNI ELYSABET, S.E., M.Si.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
30	SYAIFULLAH, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
31	SOLVIATI, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	
32	FITRI YENTI, S.H.	Panitera Muda Pidana	
33	SAPTA PUTRA SEMBIRING, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	
34	PRIMA ARDHANI, S.H.	Panitera Muda Hukum	
35	ADRIAN SAHERWAN, S.H.	Panitera Muda Tipikor	
36	NURLISMAWATI, S.H. M.H.	Panitera Pengganti	Jumlah Panitera Pengganti sebanyak 14 Orang
37	Hj. SURYANI AFAN, S.H.	Panitera Pengganti	
38	MUHAMMAD YUNUS, S.H.	Panitera Pengganti	
39	NOVA R SIANTURI, S.H.	Panitera Pengganti	
40	IRENE WISMERI, S.H.	Panitera Pengganti	
41	WURI YULIANTI, S.T., S.H.	Panitera Pengganti	
42	NOVITA SARI ISMAIL, S.H.	Panitera Pengganti	
43	ESRA RAHMAWATI A S, S.H.	Panitera Pengganti	
44	NURFITRIA, S.H.	Panitera Pengganti	
45	MARLINEN GRESLY S., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
46	AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
47	RIZA HARPENI, S.H.	Panitera Pengganti	
48	WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.	Panitera Pengganti	
49	DITA TRIWULANY, S.H.	Panitera Pengganti	
50	HENDRI RUSPIANTO, S.H.	Jurusita	Jumlah Jusurita/ Jusurita Pengganti 8 Orang
51	BAKRI, S.H.	Jurusita	
52	HARRY AN., S.H., M.H.	Jurusita	
53	MARIANTY G. SIMARMATA, S.Sos., S.H., M.H.	Jurusita	
54	LILIS TRIANA, S.H.	Jurusita	
55	ANGGIA PUTRA N., A.Md., S.H.	Jurusita	
56	ASMAILANI, A.Md.	Jurusita	
57	TARUDDIN	Jurusita Pengganti	
58	LUSIANA FEBRIANY, S.Kom.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Jumlah Fungsional Tertentu 5 Orang
59	MELLA IVA RIFANI, S.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
60	FEBRIANDRI AFLI, S.Si.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
61	FADILLAH RAHMAD, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
62	JUNI SABATINI HUTAGAOL, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil/ Pelaksana	Jumlah Klerek - Analisis Perkara Peradilan 5 Orang
63	DODI BUANA SAPUTRA, S.H.	Klerek Analisis Perkara Peradilan	
64	PURWADI, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	
65	AMELIA FITRI, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	
66	MARIO FERNANDO BUTAR-BUTAR, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	

67	KENNIA CHRISTIE, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	
68	SARI ULI TOGATOROP, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	Jumlah CPNS 9 Orang
69	KHAIRUNNISA DHIABELLA ASYARI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	
70	FRYDA KUSUMAWATI KHOIRUNNISA, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana (CPNS)	
71	SHERLY SEPTIYAN, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum (CPNS)	
72	REGI SAFITRI, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum (CPNS)	
73	LIDE CELLA SIALLAGAN, A.Md.Kom.	Klerek - Dokumentalis Hukum (CPNS)	
74	VINA CLAUDIA SITOMPUL, A.Md.A.B.	Klerek - Dokumentalis Hukum (CPNS)	
75	MARTIN PHILIP NILSON SIMARMATA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum (CPNS)	
76	TIURMA VALENTINA BATUBARA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum (CPNS)	
77	M. FIRANDA AL ANSYARI, A.Md.	Pengelola BMN	Jumlah Pengelola BMN 2 Orang
78	ARNOLDUS SIMARMATA, A.Md.	Pengelola BMN	
79	HENI HERLINA MANULLANG, A.Md.	Pengelola Perkara	
80	YAN ASRA	P3K	Jumlah Tenaga P3K 16 Orang
81	SISWANTO	P3K	
82	VICTOR SAMPE TUA	P3K	
83	FRANGKY RAHMADANI	P3K	
84	RIKI FAHDIANSYA, S.H.	P3K	
85	YUDHA SEPTIAN PRATAMA, S. H.	P3K	
86	CANTOPRA NAINGGOLAN, S.H.	P3K	
87	ERIYANI, S.Ag.	P3K	
88	HERMAN	P3K	
89	RAHMAN HIDAYAT	P3K	
90	TRY NOVITA	P3K	
91	MAY HENDRI RACHMAD, S.Kom	P3K	
92	IWANITA PERDANA PUTRI, S.H.	P3K	
93	SRI WIDYASTUTI	P3K	
94	RAHMA TASBITA SARI, S.H.	P3K	
95	AGNES OLIVIA	P3K	

A. PROMOSI DAN MUTASI

Selama Tahun 2025 telah terjadi mutasi Hakim, Pejabat struktural/ fungsional, baik mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun mutasi keluar.

MUTASI MASUK

Mutasi Masuk pada tahun 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sejumlah 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.	Ketua	Mutasi dari PN Batam
2	ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.	Hakim Karir	Mutasi dari PN Suka Makmue
3	UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H.	Hakim Karir	Mutasi dari PN Pontianak
4	YOFISTIAN, S.H., M.H.	Hakim Karir	Mutasi dari PN Jambi
5	Dr. EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor	Mutasi dari PN Semarang
6	ASLAM IRFAN DAULAY, S.H., M.H.	Panitera	Mutasi dari PN Padang
7	NOVA R SIANTURI, S.H.	Panitera pengganti	Mutasi dari PN Bangkinang
8	ESRA RAHMAWATI A S, S.H.	Panitera pengganti	Mutasi dari PN Rohil
9	PURWADI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Mutasi dari PN Batam
10	FRYDA KUSUMAWATI KHOIRUNNISA, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	CPNS
11	SARI ULI TOGATOROP, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	CPNS
12	KHAIRUNNISA DHIABELLA ASYARI, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	CPNS
13	SHERLY SEPTIYAN, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
14	REGI SAFITRI, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
15	LIDE CELLA SIALLAGAN, A.Md.Kom.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
16	VINA CLAUDIA SITOMPUL, A.Md.A.B.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
17	MARTIN PHILIP NILSON SIMARMATA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS
18	TIURMA VALENTINA BATUBARA, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	CPNS

MUTASI KELUAR

Mutasi Keluar pada tahun 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sejumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H.	Ketua	Mutasi ke PN Surabaya
2	Lifiana Tanjung, S.H., M.H.	Hakim	Mutasi ke PN Medan
3	Zefri Mayeldo, S.H., M.H.	Hakim	Mutasi ke PN Tanjung karang
4.	Indra Lesmana, S.H.	Hakim	Mutasi ke PN Jakarta Pusat
5.	Idris, S.H., M.H	Panitera	Mutasi ke PT Medan

B. PENSIUN

Data Pensiun pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sejumlah 1 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Yelmi, S.H., M.H.	Hakim Ad hoc Tipikor	Purnabakti

C. DIKLAT

Jumlah Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengikuti Diklat Teknis pada tahun 2025 adalah 28 (Dua puluh delapan) orang dan Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Non Teknis pada tahun 2025 adalah 29 (Dua puluh sembilan) orang.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025 sebagai berikut :

1. REALISASI DIPA 01

No	Dipa 01	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	14,819,388,000	14,698,139,783	99,18%	121,248,217	0,82%
2	BELANJA BARANG	2,386,036,000	2,383,035,830	99,87%	3,000,170	0,13%
3	BELANJA MODAL	877,000,000	876,795,156	99,98%	204,844	0,02%
	TOTAL	18,082,424,000	17,957,970,769	99,31%	124,453,231	0,69%

2. REALISASI DIPA 03

No	Dipa 03	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	518,425,000	517,888,850	99,90%	536,150	0,10%

Satuan Kerja	Kode Akun						
	425131	425231	425232	425233	425239	425912	425151
Pengadilan Negeri Pekanbaru	5.500.000	160.000	14.860.000	52.730.000	139.470.000	-	19.176.606

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pekanbaru melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

A. KENDARAAN DINAS

Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Sedan Toyota Vios	08-09-2006	v			Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala
2	Sedan Toyota Vios	08-09-2006		v		Kuasa Pengguna Barang
3	Minibus Opel Blazer	12 -12-2002		v		Pengolah Data dan Informasi
4	Kijang INNOVA	20-12-2011	v			Sekretaris
5	Kijang INNOVA	13-12-2013	v			Panitera
6	Toyota Avanza	08-02- 2012	v			Kasubbag Umum dan Keuangan
7	Toyota Fortuner	22-11-2019	v			Ketua (Pinjam Pakai Pemda)
8	Toyota Harrier	2014		v		Wakil Ketua (Pinjam Pakai Pemda)
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda GL Pro	12 -12-1997		v		Staf Hukum
2	Honda Mega Pro	23-08-2006	v			Ajudan Panitera
3	Honda Mega Pro	23-08-2006	v			JSP
4	Honda Supra 125 NF.SD	12-08-2005	v			Ajudan Ketua
5	Honda Supra 125 NF.SD	12-08-2005	v			Kuasa Pengguna Barang
6	Honda Supra 125 TR	25-08-2008	v			JS
7	Honda Supra 125 TR	25-08-2008	v			PP
8	Honda Supra 125 TR	25-08-2008	v			Ajudan Wakil Ketua
9	Honda Supra 125 TR	25-08-2008	v			Panmud Perdata
10	Honda Supra 125 TR	25-08-2008	v			Kuasa Pengguna Barang
11	Honda Supra 125 NF.SD	31-01-2006	v			JS
12	Honda Supra 125 NF.SD	31-01-2006	v			Staf Umum
13	Honda Mega Pro	25-11-2011	v			Staf Kepegawaian

B. RUMAH DINAS

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1			Dihuni
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			Dihuni
3	Rumah Dinas Hakim	11	9	1	1	Dihuni (1)
4	Rumah Dinas Panitera	1	1			Tidak Dihuni

C. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
I. SARANA/ PRASARANA GEDUNG			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	5	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	5	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Kepaniteraan	5	
9	Ruang Kesekretariatan	4	
10	Ruang Jurusita	1	
11	Ruang Panitera Pengganti	1	
12	Ruang Mediasi	1	
13	Ruang Command Center	1	
II. SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN			
1	Stationary Generating Set	1	
2	Pompa Air	2	
3	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	7	
4	Mesin Fotocopy Electronic	1	

5	Lemari Besi/Metal	15	
6	Lemari Kayu	63	
7	Rak Besi	8	
8	Rak Kayu	23	
9	Filing Cabinet Besi	56	
10	Brandkas	2	
11	Tabung Pemadam Api	2	
12	CCTV - Camera Control Television System	8	
13	White Board	22	
14	Peta	1	
15	Mesin Absensi	3	
16	LCD Projector/Infocus	2	
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	
18	Alat Kantor Lainnya	4	
19	Meja Kerja Besi/Metal	1	
20	Meja Kerja Kayu	222	
21	Kursi Besi/Metal	325	
22	Kursi Kayu	127	
23	Sice	24	
24	Bangku Panjang Besi/Metal	1	
25	Bangku Panjang Kayu	35	
26	Meja Rapat	1	
27	Meja Komputer	24	
28	Pot Bunga	2	
29	Partisi	3	
30	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
31	Jam Mekanis	22	
32	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5	
33	A.C. Split	50	
34	Kipas Angin	41	
35	Televisi	15	
36	Amplifier	1	
37	Loudspeaker	14	
38	Sound System	16	
39	Wireless	1	
40	Microphone	8	
41	Microphone Table Stand	5	
42	Stabilisator	10	

43	Camera Video	2	
44	Lambang Garuda Pancasila	8	
45	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	
46	Tiang Bendera	7	
47	Dispenser	6	
48	Mimbar/Podium	1	
49	Palu Sidang	4	
50	Lambang Instansi	3	
51	Gordyin/Kray	31	
52	Tangga	1	
53	Bracket Standing Peralatan	1	
54	Audio Mixing Console	1	
55	Audio Visual	1	
56	Microphone/Wireless MIC	1	
57	Microphone/Boom Stand	1	
58	Uninterruptible Power Supply (UPS)	29	
59	Camera Adaptor	19	
60	Mixer PVC	1	
61	Camera Digital	3	
62	LCD Monitor	1	
63	Camera Conference	1	
64	Telephone (PABX)	1	
65	Facsimile	2	
66	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	7	
67	Network Monitoring System	1	
68	Unit Antena Transceiver SHF Portable	21	
69	Genset	2	
70	Conection Cable 23 Linght 3 mm	2	
71	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	
72	Internet	1	
73	Komputer Jaringan Lainnya	3	
74	P.C Unit	104	
75	Lap Top	37	
76	Tablet PC	1	
77	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	
78	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	
79	Computer Compatible	1	
80	Monitor	14	

81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	19	
83	External/ Portable Hardisk	2	
84	Peralatan Personal Komputer Lainnya	6	
85	Server	4	
86	Router	1	
87	Hub	6	
88	Terminal	1	
89	Rak Server	1	
90	CAT 6 Cable	7	
91	Kabel UTP	4	
92	Peralatan Jaringan Lainnya	8	
93	Peralatan Komputer Lainnya	1	
94	Monografi	11	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi E-Court

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online dan melakukan Pembayaran Panjar Biaya Perkara online, Pemanggilan Pihak secara online dan Persidangan secara online. Masyarakat dapat mengakses e-court melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id

Berikut jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didaftarkan melalui e-court tahun 2025 :

Satuan kerja	Pendaftaran (Dibayar)	e litigasi	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
Pengadilan Negeri Pekanbaru	1058	319	1020	471	85	19	445

2. Implementasi SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengimplementasikan SIPP versi 6.0.1. Seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK dapat diakses oleh masyarakat melalui SIPP dengan alamat **[http:// sipp.pn-pekanbaru.go.id](http://sipp.pn-pekanbaru.go.id)**.

3. Implementasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara terus menerus pada masing-masing area perubahan.

Terdapat 3 komponen dalam penilaian pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu Komponen Pengungkit, Komponen Reform dan Komponen Hasil. Adapun 6 Area Pembangunan Zona Integritas antara lain :

- 1) Area 1 : Manajemen Perubahan
- 2) Area 2 : Penataan Tatalaksana
- 3) Area 3 : Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- 4) Area 4 : Penguatan Akuntabilitas
- 5) Area 5 : Penguatan Pengawasan
- 6) Area 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB Pada tanggal 10 Desember 2019.



B. SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan kelanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang bertujuan agar satuan kerja di bawah lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan.

Pengadilan yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparaturnya yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara. Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh asesmen AMPUH sejumlah 800,18 dengan kategori UTAMA.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan yang meliputi aspek :

1. Manajemen peradilan.
2. Administrasi perkara.
3. Administrasi persidangan.
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan Pengaduan

C. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai SK Dirjen Badilum No. 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

PTSP PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

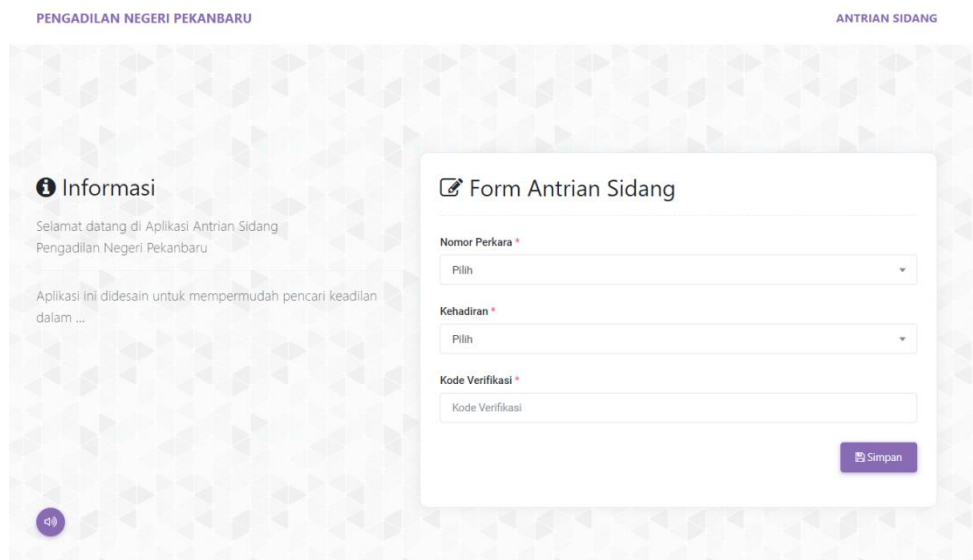


D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

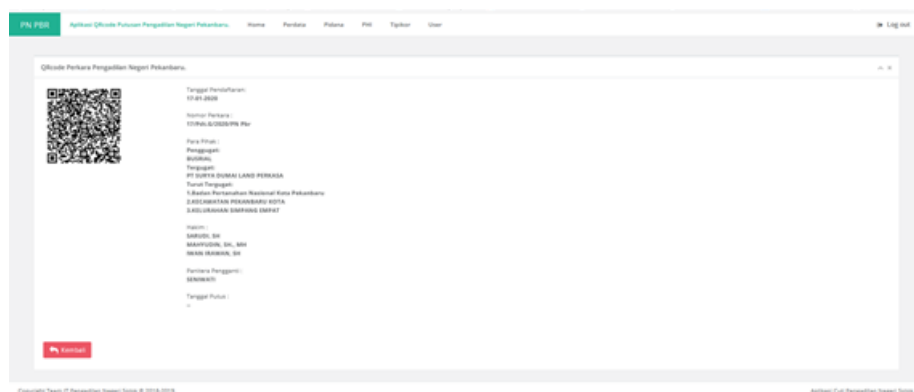
1. Aplikasi Antrian Panggilan Sidang

Aplikasi Antrian Panggilan Sidang adalah aplikasi yang berbasis localhost, bertujuan untuk mentertibkan persidangan dengan melakukan antrian persidangan, aplikasi ini terintegrasi dengan data harian persidangan di SIPP. Aplikasi ini akan memanggil para pihak yang berperkara apabila para pihak telah hadir dan siap disidangkan sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.



2. Aplikasi Barcode Putusan

Putusan PN Pekanbaru memiliki barcode sehingga masyarakat dapat meng scan QR-Barcode Putusan untuk melihat Nomor Perkara, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.



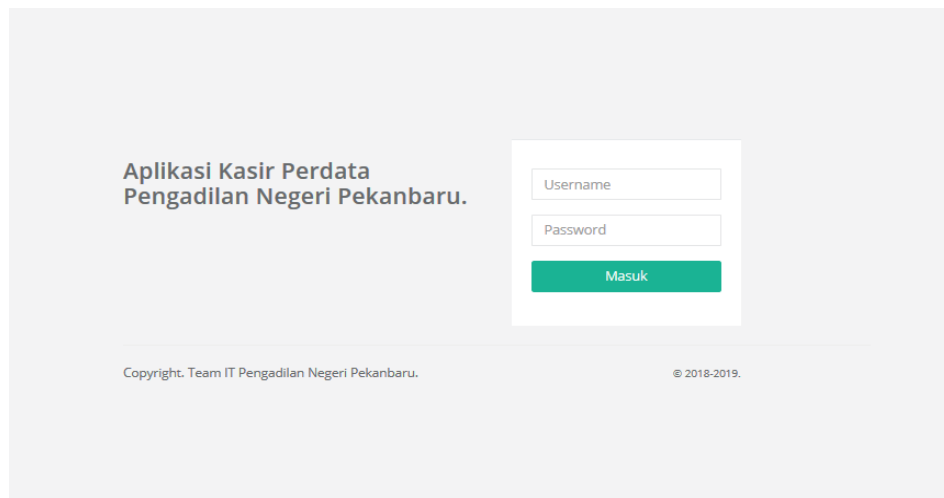
3. Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP

Aplikasi untuk melakukan proses antrian pengunjung pada PTSP untuk mendapatkan layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru.



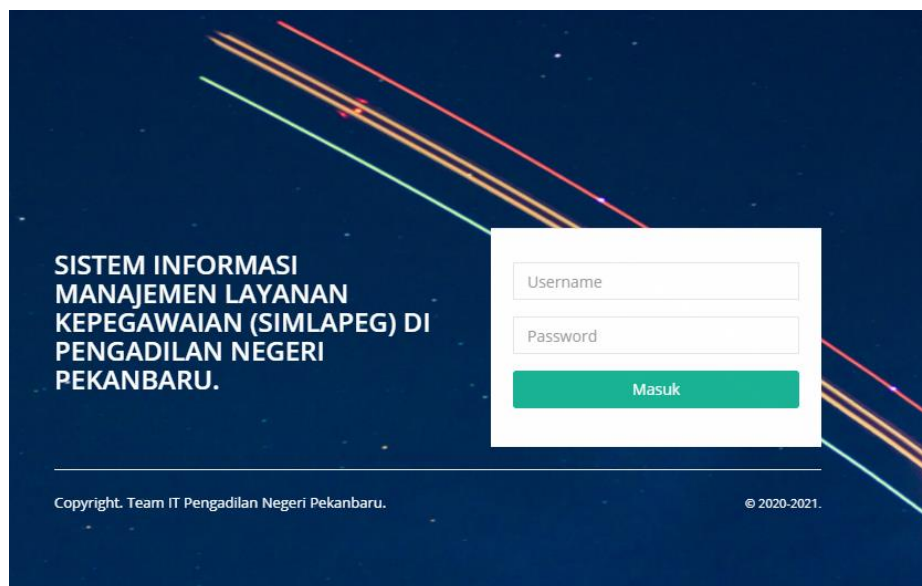
4. Aplikasi Kasir

Aplikasi yang memudahkan kasir perdata dalam melakukan proses transaksi penerimaan dan pengeluaran dan melaporkan uang masuk dan uang keluar setiap hari kepada panitera.



5. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SIMLAPEG)

Aplikasi yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepegawaian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi SIMLAPEG yaitu, Informasi dan Progres Kenaikan Pangkat, Informasi dan Surat KGB, Permohonan dan Pemberian Cuti.



6. Audio Peringatan Anti Gratifikasi

Aplikasi untuk melakukan pengumuman/pemberitahuan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan dan himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparaturnya pengadilan dan masyarakat) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.

The screenshot shows a web browser displaying the 'Audio Peringatan Anti Gratifikasi' application. The page features a header with the title and a subtitle: 'Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019'. Below the header, there are four audio notification cards, each with a red megaphone icon and a 'Play' button. The cards are:

- Anti Gratifikasi (2 Jam sekali)**: Peringatan ini di putar 2 jam sekali. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar dan Audio Anti Gratifikasi akan diputar setiap 2 jam sekali secara otomatis.
- Informasi (2 jam sekali)**: Informasi ini di putar 2 jam sekali. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar dan Informasi akan diputar setiap 2 jam sekali secara otomatis.
- Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Perempuan)**: Peringatan ini di putar sebelum persidangan dimulai. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar.
- Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Laki-laki)**: Peringatan ini di putar sebelum persidangan dimulai. Silahkan tekan tombol Play untuk memulai diputar.

At the bottom right of the interface, there is a watermark that says 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows.'

7. Aplikasi DUK PN Pekanbaru

Aplikasi yang menampilkan data hakim dan data pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan daftar urutan kepangkatan Hakim dan Pegawai.

The screenshot shows a web browser displaying the 'DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN (DUK) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA'. The table lists the following data:

Foto	Identitas	Kemungkinan Gaji Berkala	Pendidikan	Status
	MAKDISON, S.H. Laki-laki NIP: 87181011996030001 Jabatan: Wakil Ketua TMJ Jabatan: 19.12.12 Pangkat/Golongan: IV/c TMJ Pangkat/Golongan: 19.14.20 Masa: Duet PN Jakarta Selatan	01.01.24	Uinir Andalas (1995) Sarjana	aktif
	FITRIQZAL VANTO, S.H. Laki-laki NIP: 1917010119920300001 Jabatan: Hakim TMJ Jabatan: 19.12.12 Pangkat/Golongan: IV/c TMJ Pangkat/Golongan: 19.14.20 Masa: Duet PN Bengkulu	01.01.24	Uinir Lancang Kuning (1992) Sarjana	aktif

At the bottom right of the table, it says 'Jumlah Pegawai : 67 Orang' and 'Hakim Karir termasuk:'.

8. QR-Code Layanan PTSP

QR-Code Layanan PTSP Pengadilan Negeri Pekanbaru diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan PTSP dan persyaratan yang diperlukan. Terdapat enam QR-Code Layanan PTSP, yaitu QR-Code Perdata, Pidana, PHI, Tipikor, Hukum, dan Umum.



PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PIDANA

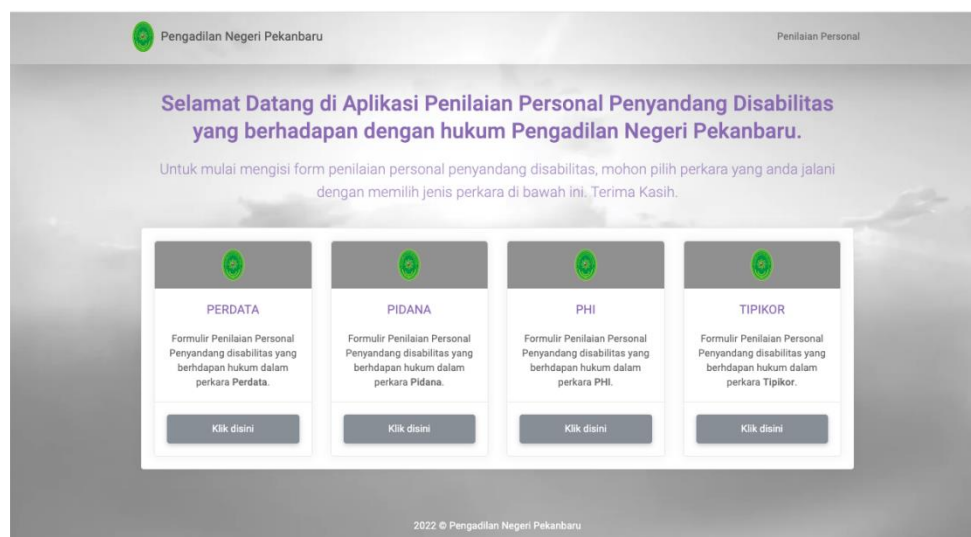
Halaman Depan

NO	JENIS LAYANAN	WAKTU	BIAYA	SYARAT
1	PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA	15 Menit	Tidak Ada Biaya	Lihat
2	IZIN PENYITAAN	10 Menit	Tidak Ada Biaya	Lihat
3	IZIN PENGGELEDAHAN	10 Menit	Tidak Ada Biaya	Lihat
4	PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN	10 Menit	Tidak Ada Biaya	Lihat
5	PERMOHONAN DIVERSI	10 Menit	Tidak Ada Biaya	Lihat

9. Aplikasi Penilaian Personal Disabilitas

Aplikasi yang digunakan untuk mengisi form penilaian personal penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan Hukum secara elektronik.

Aplikasi ini dapat melihat jumlah penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan Hukum serta alat bantu berjalan yang dibutuhkan.



10. Aplikasi Survei Disabilitas

Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan maupun sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Mohon isi survei berikut untuk peningkatan layanan kami.
Terima Kasih.

Biodata Survey Saran

DATA DIRI

Nama Lengkap
Nama lengkap anda

Umur
Umur anda Tahun

Jenis Kelamin
Pilih

Jenis Disabilitas
Pilih

Alamat
Alamat anda

Nomor kontak
Nomor kontak anda

Keperluan / layanan yang digunakan
Pilih

Selanjutnya →

11. Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor (APATUK)

Aplikasi yang digunakan dalam pengajuan permintaan alat tulis kantor di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Permintaan ATK Admin

Root Administra...







Beranda
Pengaturan Root
Permintaan
Barang ATK
Pengajuan
Validasi

Kamis, 03 November 2022

Barang ATK

Tambah

Search PDF Excel Print

No ↓	Nama ↓	Jumlah ↓	Aksi
1	Kertas F4	20 Rim	 
2	Map Kertas	60 Buah	 
3	Pena	30 Buah	 

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

2022 © All Right Reserved Tentang Lisensi Petunjuk Penggunaan

12. Aplikasi Salinan Putusan Online

Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan salinan putusan.



SALINAN PUTUSAN PERDATA

Salinan Putusan Perdata dapat dimohonkan secara online kecuali untuk perkara yang e-Litigasi. Untuk selanjutnya Klik Tombol dibawah.

Klik disini



SALINAN PUTUSAN PIDANA

Salinan Putusan Pidana dapat dimohonkan secara online untuk perkara Pidana Biasa, Anak, dan Singkat. Untuk selanjutnya Klik Tombol dibawah.

Klik disini



SALINAN PUTUSAN PHI

Salinan Putusan PHI dapat dimohonkan secara online untuk perkara PHI. Untuk selanjutnya Klik Tombol dibawah.

Klik disini



SALINAN PUTUSAN TIPIKOR

Salinan Putusan Pidana Tipikor dapat dimohonkan secara online untuk perkara Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya Klik Tombol dibawah.

Klik disini

13. Aplikasi Eksekusi Online

Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan Eksekusi

Aplikasi Eksekusi Online

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

Login

Register



Syarat Permohonan Eksekusi

Eksekusi Putusan Pengadilan

1. Surat Permohonan Eksekusi
2. Surat Kuasa (optional/jika ada kuasa hukum)
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi
5. Fotocopy Putusan Kasasi

Eksekusi Hak Tanggungan

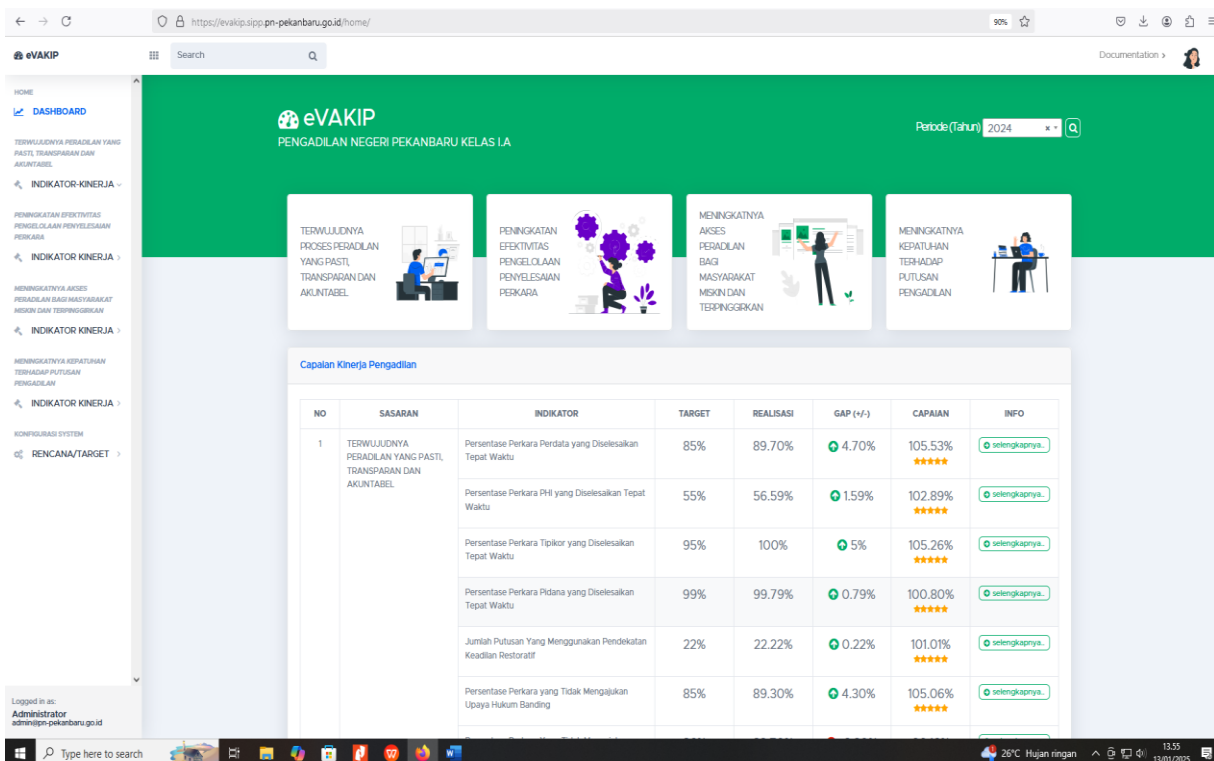
Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Putusan Lembaga Non Peradilan (cth : BANI/BPSK/KPPU)

Eksekusi Pengosongari/Pemenang Lelang

14. Aplikasi e-Vakip

Aplikasi yang digunakan untuk Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pengadilan Negeri Pekanbaru.



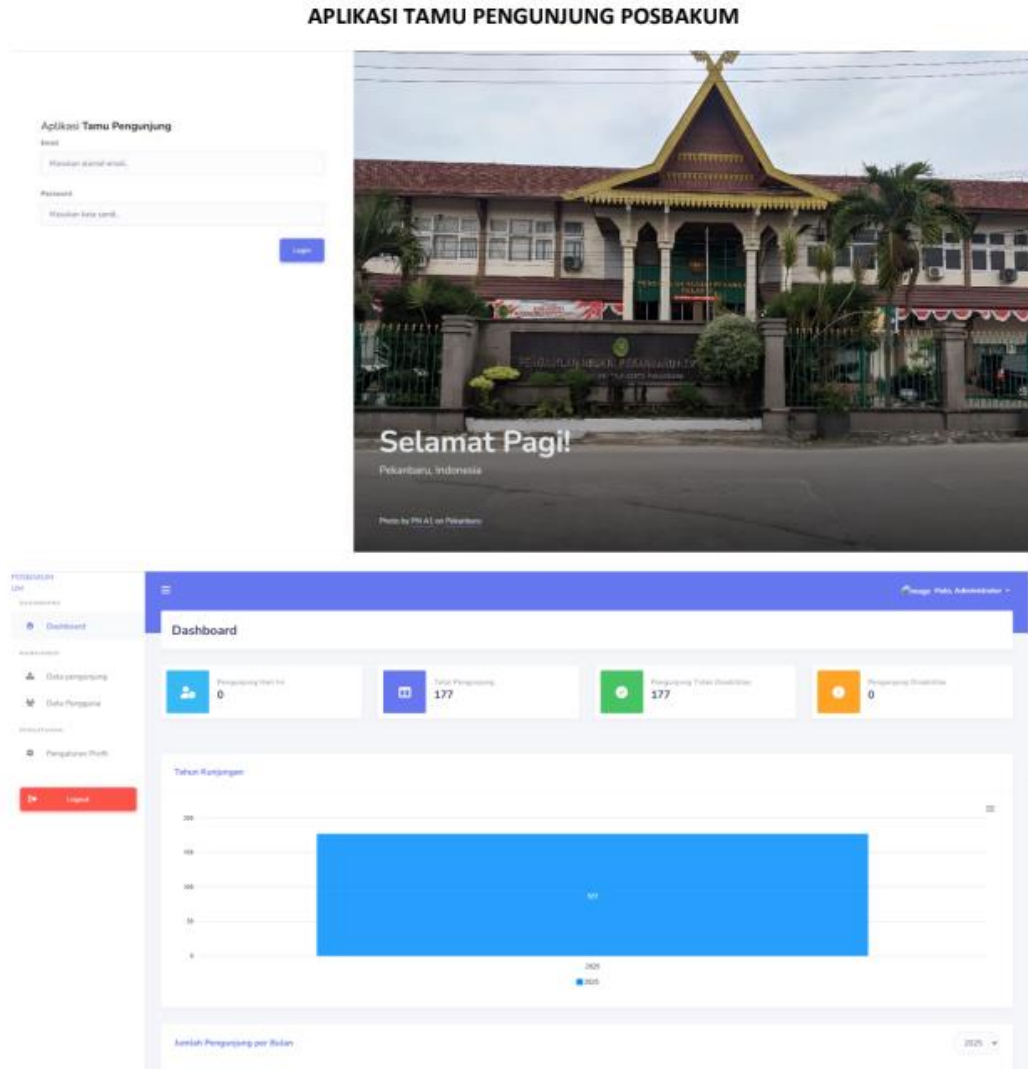
15. SIGADIS TAMILUSIA (Siap Siaga Disabilitas, Wanita Hamil / Menyusu dan Lanjut Usia)

Layanan kepada masyarakat kelompok prioritas, disabilitas, ibu hamil/ menyusui dan lanjut usia dengan menyediakan layanan untuk melakukan antar jemput gratis.



16. Aplikasi Tamu Pengunjung Posbakum

Aplikasi yang digunakan untuk mendata tamu pengunjung yang menggunakan layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibantu oleh Wakil Ketua, meliputi:

1. Semua tingkahlaku Para Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera Pengganti dan seluruh Pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim Pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.
4. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh Para Panitera Muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Untuk pengawasan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025 telah dilakukan secara periodik.

NO	NAMA KEGIATAN PENGAWASAN	SUBJEK PENGAWAS	OBJEK YANG DIAWASI	WAKTU	TEMPAT
1	Pengawasan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru	PT Riau	Seluruh Bidang	Tanggal 14 s/d 15 Juli 2025	PN. Pekanbaru
2	Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Pekanbaru	Tim Ditjen Badilum	Seluruh Bidang	Tanggal 24 September 2025	PN. Pekanbaru

B. Evaluasi

Pada tahun 2025 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Melaksanakan rapat tindak lanjut atas temuan dari Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Riau dan Tim Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
3. Tahun 2025 evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui :
 - a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan responden terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **99%** dengan mutu pelayanan **Sangat Baik**.
Survey Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK) secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2025, hasil Indeks Presepsi Anti Korupsi sebesar **99%** dengan mutu pelayanan **Sangat Baik**.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pengadilan Negeri Pekanbaru berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan.
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
6. Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan aplikasi e-Court dengan fitur efilling (pendaftaran perkara secara online), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara online), e-summons (pemanggilan pihak secara online) dan e-Litigation (persidangan secara online). Sehingga pendaftar gugatan/ permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan.
7. Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan aplikasi e-Berpadu (elektronik berkas pidana terpadu) untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru masih mengalami kendala antara lain :

1. Sumber daya manusia, khususnya staf yang ahli dibidang teknologi informasi masih kurang.
2. Sarana dan prasarana Gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang.
3. Gedung Kantor yang tidak memenuhi prototype Gedung Pengadilan Kelas IA
4. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara karena tidak tersedia anggaran rehab rumah dinas

B. Saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pekanbaru maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.